

KETERLIBATAN PEMERINTAHAN JOKO WIDODO DALAM UPAYA PERDAMAIAN DI AFGHANISTAN

Ali Noer Zaman^{1,*}

¹Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta

*E-mail: alinoerzaman@umj.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini membahas mengenai pertimbangan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam upaya perdamaian di Afghanistan, sebuah kebijakan yang dianggap luar biasa karena beberapa hal seperti orientasi kebijakan luar negeri pemerintahan Joko Widodo yang dianggap lebih mempertimbangkan kepentingan domestik dan tidak seperti pendahulunya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang aktif di panggung internasional, dan latar belakang keagamaan Presiden Joko Widodo yang dipersiapkan dari kalangan abangan. Di sisi lain, Afghanistan adalah sebuah negara dengan kultur Islam yang sangat kuat dan konflik di Afghanistan sendiri dianggap tidak mudah untuk diselesaikan. Data didasarkan pada studi kepustakaan baik melalui internet maupun dokumen tercetak. Teori yang dipakai adalah pilihan rasional (*rational choice*). Artikel berkesimpulan bahwa langkah aktif Presiden Joko Widodo dalam upaya perdamaian di Afghanistan merupakan amanah dari konstitusi di mana Indonesia menganut kebijakan luar negeri yang bebas aktif, yakni bebas dalam pengertian tidak memihak pada blok keamanan, sedangkan aktif berarti terlibat dalam upaya perdamaian internasional. Pertimbangan lain kemungkinan adalah Presiden Jokowi ingin dipandang memiliki kebijakan Islam yang moderat, dan aktif dalam membela kepentingan umat Islam di seluruh dunia, termasuk di Afghanistan, sehingga hal ini diharapkan bisa memberi keyakinan pada publik di dalam negeri bahwa Presiden Joko Widodo tidak memiliki kebijakan anti Islam.

Kata kunci: Afghanistan, Perdamaian, Kebijakan Luar Negeri, Indonesia, Jokowi

ABSTRACT

This article discusses the reasons of why Indonesian President Joko Widodo had promoted peace efforts in Afghanistan, a policy that is considered extraordinary as his foreign policy orientation seemed to be more reflecting domestic interests and in contrast with his predecessor, President Susilo Bambang Yudhoyono, who was active on the international stage. President Joko Widodo's religious background is also perceived to be abangan (non-Islamic orientation). On the other hand, Afghanistan is a country with a very strong Islamic culture and the conflicts in the country are not easily resolved. Research data was collected from online literature and printed documents. The theory used is rational choice. The article concludes that President Joko Widodo's peace building efforts in Afghanistan are part of Indonesian in creating world peace. From domestic point of view, the policy would also give credit that President Joko Widodo does not have an anti-Islamic policy.

Keywords: Afghanistan, Peace, Indonesian Foreign Policy, Jokowi

PENDAHULUAN

Saat memulai jabatan sebagai presiden Republik Indonesia ke-7, banyak pihak meragukan kemampuan Presiden Joko Widodo alias Jokowi dalam diplomasi internasional. Keraguan ini muncul akibat latar belakang Presiden Jokowi dianggap tidak pernah atau jarang bergelut dalam dunia internasional. Sebelum menjadi presiden, September tahun 2014, Jokowi adalah gubernur DKI Jakarta, yang dipangkunya selama sekitar dua tahun. Bekas walikota Surakarta dua periode ini, yakni 2004-2009, dan 2009-2012, sebelum berkiprah dalam bidang politik dikenal sebagai pengusaha mebel. Aktivitas Jokowi saat menempuh pendidikan juga tak menunjukkan bahwa yang bersangkutan memiliki banyak pengalaman dalam berinteraksi dengan dunia internasional.

Dalam pemaparan visi-misinya, pasangan Jokowi-JK menyatakan bahwa diplomasi Indonesia adalah diplomasi "...yang menempatkan Indonesia sebagai kekuatan regional dengan keterlibatan global secara selektif, dengan memberi prioritas pada permasalahan yang secara langsung berkaitan dengan kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia". Pernyataan ini bisa ditafsirkan sebagai perubahan dari aktivisme internasional semasa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) ke domestifikasi kebijakan luar negeri Indonesia.

Mangadar Situmorang, rektor dari Universitas Parahyangan, menyatakan bahwa kebijakan luar negeri Jokowi akan ditandai dengan kebijakan yang *low profile*, dengan mengurangi aktivitas/tampilan di arena internasional. Pasangan Jokowi-JK akan lebih banyak menghabiskan waktu untuk memperbaiki kondisi perekonomian domestik. Keadaan tersebut tentu kontras dengan apa yang dilakukan oleh presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut penilaian Mangadar Situmorang, Presiden

Susilo Bambang Yudhoyono telah tampil sebagai presiden yang high profil, ditandai dengan keikutsertaan dalam Gerakan 20, yang melibatkan negara-negara maju dan ekonomi menengah dunia, APEC, APT, maupun kegiatan kemitraan dengan Asean. Indonesia juga memelopori Bali Democracy Forum, mengirim pasukan TNI dalam misi perdamaian PBB, shuttle diplomasi dalam penyelesaian konflik perbatasan Thailand-Kamboja, dan juga pelatihan Peace Keeping Force di Sentul. Semua itu menunjukkan bahwa Indonesia telah berhasil menciptakan panggung sendiri dan berani tampil keluar (Situmorang, 2018).

Penilaian serupa juga disampaikan oleh Ludiro Madu. Jika SBY ingin merangkul semua pihak melalui slogan *million friends, zero enemies*, pasangan Jokowi-JK ingin membangun Indonesia sebagai poros maritim dunia. Melalui agenda baru ini, pemerintahan Jokowi ingin melanjutkan kiprah regional dan internasional yang selama ini telah dilakukan Indonesia namun saat ini menekankan manfaat ekonomi dari pertemuan dan kerjasama tersebut. Ludiro Madu lebih lanjut menyatakan:

Polugri pemerintahan Jokowi dianggap lebih berorientasi domestik dan mengutamakan hubungan bilateral. Karakteristik polugri itu berbeda dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Orientasi regional-global berdasarkan "million friends, zero enemies" lebih mewarnai polugri Presiden SBY dan mulai ditanggalkan pemerintahan Jokowi. Dengan polugri itu, Jokowi diharapkan memberikan prioritas kepada kepentingan nasional ketimbang asing dalam interaksi antarbangsa (Madu, 2018).

Sedangkan Mohammad Rosyidin menyatakan, domestikasi politik luar negeri akan memberi dampak negatif dalam jangka panjang bagi citra Indonesia di mata internasional. Karena hal tersebut akan membuat Indonesia gagal menjadi pemain global mengikuti China dan India. Bagaimanapun, kebijakan didalam negeri perlu ditopang oleh aktivisme di luar negeri (Rosyidin, 2014).

Setelah tiga tahun berlalu, penilaian berbeda atas politik luar negeri Presiden Jokowi disampaikan oleh mantan juru bicara presiden, Dino Patti Jala. Ketua Masyarakat Diaspora Indonesia (Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) ini menyatakan bahwa selama tiga tahun berjalan Presiden Joko Widodo semakin mengintensifkan peran Indonesia di luar negeri, baik dalam konteks regional maupun dan global. Ia menyatakan: "Dahulu ada pandangan bahwa Jokowi pada awal pemerintahannya tidak terlalu mementingkan politik luar negeri, tetapi yang terjadi sekarang justru sebaliknya." (Metrotvnews.com, 2018)

Aktivisme Presiden Jokowi di arena internasional salah satunya dibuktikan dengan inisiatif Presiden Jokowi untuk mensponsori perdamaian di Afghanistan, sebuah negara yang telah lama tercabik-cabik dalam perang saudara setelah ditinggalkan oleh Uni Soviet. Untuk merealisasikan dukungan tersebut, Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke Afghanistan pada 29 Januari 2018. Presiden Jokowi menyatakan bahwa : "Kunjungan saya ke Afghanistan merupakan kunjungan kenegaraan bilateral pertama Presiden Republik Indonesia setelah hampir enam dekade. Terakhir Presiden Soekarno berkunjung ke Afghanistan pada Mei 1961" (Okenews.com, 2018).

Sebelum kunjungan Jokowi ke Afghanistan, Indonesia sebelumnya juga telah mengundang Komite Rekonsiliasi

Afghanistan ke Jakarta (Detiknews.com, 2018). Bahkan, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga dilibatkan dalam proses perdamaian tersebut. Wakil Presiden ini telah diundang ke Kabul Afghanistan pada tanggal 28 Februari 2018 guna mengunjungi laboratorium perdamaian di Afghanistan dan pembicaraan tentang para ulama yang berkunjung ke Indonesia.

Keterlibatan pemerintahan Jokowi-JK dalam proses perdamaian di Afghanistan ini tentu merupakan sebuah kejutan. Afghanistan adalah sebuah negara yang memiliki penduduk mayoritas beragama Islam. Tradisi dan budaya Islam telah melekat dalam kehidupan sosial dan negara Afghanistan. Banyak ajaran dan hukum Islam yang telah diadopsi dan dipraktekkan di negara Afghanistan. Oleh karena itu, diasumsikan bahwa penyelesaian perdamaian di Afghanistan menuntut sebuah solusi yang memperhatikan kepentingan Islam. Apalagi, konflik di Afghanistan juga terjadi di antara suku-suku berbeda, yang masing-masing dibalut oleh perbedaan wilayah, serta sekte agama, utamanya Syiah dan Sunni.

Presiden Jokowi selama ini dipersepsi sebagai politisi dengan latar belakang abangan (Geertz, 1964). Secara tradisi, seorang abangan biasanya menjalankan ritual-ritual warisan agama Hindu-Buddha, seperti slamatan dan sesajen. Dalam bidang politik, kaum abangan tidak terikat kepada partai-partai Islam, tetapi lebih condong pada partai-partai nasionalis yang sekular. Dengan sentimen keagamaan yang lebih dekat kepada budaya Jawa, orang-orang abangan tidak menyukai formalitas beragama, apalagi menggunakan jargon-jargon dan bahasa agama untuk menarik simpati massa. Dalam soal pendidikan, orang abangan juga lebih tertarik untuk menyekolahkan anak mereka pada sekolah-sekolah bikinan Belanda atau di masa kemerdekaan ke sekolah-sekolah

nasional milik pemerintah, dan bukan pada pendidikan pesantren yang menjadi kebanggaan kelompok Islam santri.

Dengan latar belakang pribadi dan sosial-politik abangan tersebut, maka menjadi menarik untuk diteliti ketika Presiden Jokowi terlibat dalam proses perdamaian di sebuah negara yang secara tradisional dikenal sebagai negara Islam. Apakah tindakan presiden Jokowi tersebut didorong oleh motivasi politik ataukah karena keinginan untuk mewujudkan politik Indonesia yang bebas namun aktif mewujudkan perdamaian di dunia? Artikel ini ingin melihat alasan Presiden Jokowi terlibat dalam perundingan perdamaian di Afghanistan.

Telah ada banyak studi yang membahas tentang kebijakan dan politik luar negeri RI. Salah satu karya klasik dalam bidang ini, sebagai misal, ditulis oleh Rizal Sukma (Sukma, 2003). Menurut Rizal Sukma, meskipun Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas terbesar di dunia, namun Islam tidak pernah menjadi identitas dalam politik luar negeri. Dengan senantiasa muncul ketegangan antara Islam dan negara sejak kemerdekaan tahun 1945, maka kebijakan luar negeri Indonesia menjadi sesuatu yang kompleks. Klaim bahwa Indonesia bukan negara sekular dan bukan negara teokratis telah membuat politik dan kebijakan luar negeri Indonesia menjadi kompleks. Dengan kejatuhan Presiden Suharto tahun 1998, Islam memang memiliki peran yang meningkat dalam politik di Indonesia, namun peran Islam dalam kebijakan luar negeri tetaplah sekunder. Dilema identitas ganda dan kelemahan domestik telah membatasi ekspresi Islam dalam kebijakan luar negeri.

Karya selanjutnya berasal dari I Gede Wahyu Wicaksana, yang menulis disertasi berjudul *Islam and Indonesia's Foreign Policy* (Wicaksana, 2012). Dalam karya tersebut, Wicaksana mengeksplorasi peran Islam dalam kebijakan luar negeri

Indonesia, di mana Islam akhir-akhir ini sering mendapatkan sorotan dunia akibat ekstremisme Islam menjadi salah satu tantangan besar terhadap tatanan dunia setelah perang dingin. Maka penulis tertarik untuk mengetahui apakah agama memiliki pengaruh dalam penyusunan kebijakan luar negeri dengan mengambil kasus hubungan Indonesia dan Pakistan. Uraian pertama-tama difokuskan pada peran Islam dalam pembentukan identitas nasional, kepentingan elite dan politik domestik, serta situasi eksternal. Selanjutnya diuraikan tentang perkembangan relasi Jakarta-Islamabad berdasarkan rezim-rezim yang memerintah. Pada masa Presiden Sukarno, mulai terjadi pergeseran untuk menghindari penggunaan identitas Islam. Apalagi, di zaman Suharto, Islam tidak dianggap sebagai faktor penting dalam kebijakan luar negeri, karena pemerintahan Orde Baru cenderung mengejar kepentingan-kepentingan ekonomi dan stabilitas keamanan. Namun, pada tahun 1990, pemerintahan Suharto mulai memberi perhatian pada Islam dalam kebijakan luar negeri dan pada saat yang sama Pakistan mulai mendekatkan diri kekuatan-kekuatan di Asia Timur dan Asia Tenggara. Pada masa ini Islam tetap tidak menjadi identitas politik luar negeri, karena Presiden Suharto tetap konsisten pada implementasi politik luar negeri bebas aktif. Dalam kesimpulan, disertasi ini menyatakan bahwa meskipun Islam memiliki peran penting dalam kebijakan Indonesia terhadap Pakistan, namun Islam tidak menjadi rujukan dan pertimbangan utama.

Mohamad Zakaria Al Anshori menulis disertasi berjudul *The role of Islam in Indonesia's Foreign Policy* (Zakaria, 2016). Karya ini bertujuan meneliti sejauh mana Islam mempengaruhi kebijakan luar negeri di era setelah pemerintahan Suharto, terutama meneliti lingkungan yang membuat Islam

berpengaruh dan lingkungan dimana pengaruh Islam berkurang dalam kebijakan luar negeri. Dengan perhatian utama pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, isu yang dibahas adalah kebijakan Indonesia terhadap program nuklir Iran, kemerdekaan Kosovo, dan negara Palestina. Studi ini menekankan saling kait antara kelompok-kelompok Muslim dengan pemerintah dalam kebijakan luar negeri. Di era ini, peran Islam memang semakin besar dalam kebijakan luar negeri, namun kepentingan mereka diakomodasi sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan kepentingan nasional, terutama keutuhan NKRI. Dalam kasus nuklir Iran, pemerintah terlihat tunduk pada kepentingan kelompok yang didukung oleh parlemen. Namun belakangan, sikap pemerintah berubah dengan memilih abstain terkait resolusi Majelis Keamanan PBB nomor 1803. Dalam kasus kemerdekaan Kosovo, pemerintah bersikukuh tidak mengakui kemerdekaan Kosovo, yang berbeda dengan aspirasi kelompok Islam. Pemerintah menentang aspirasi kelompok Islam yang menginginkan kemerdekaan Kosovo, karena hal itu bisa bertentangan dengan kepentingan nasional, yaitu menjaga keutuhan NKRI. Sikap padu antara pemerintah dan kelompok Islam ditunjukkan dalam kasus negara Palestina.

Dengan memperhatikan karya-karya yang dikemukakan di atas, jelaslah bahwa belum ada sebuah karya pun yang membahas tentang keterlibatan pemerintahan Jokowi dalam upaya perdamaian di Afghanistan. Dengan demikian, penelitian ini merupakan penelitian perintis.

METODE PENELITIAN

Untuk meneliti tema keterlibatan pemerintahan Jokowi-JK dalam proses perdamaian di Afghanistan, penelitian ini

akan menggunakan teori rational choice. Teori ini digunakan untuk memahami alasan-alasan pemerintahan Jokowi-JK dalam proses perdamaian di Afghanistan, kelompok-kelompok yang mendorong keterlibatan tersebut, dan pertimbangan-pertimbangan politis di balik kebijakan tersebut. Banyak pihak menilai bahwa mewujudkan perdamaian di Afghanistan bukanlah sesuatu yang mudah. Sebagai misal, konflik di Afghanistan melibatkan banyak suku dan sekte agama yang bertentangan satu sama lain (Collins, 2011). Di samping itu, konflik di Afghanistan melibatkan aktor-aktor internasional yang memiliki kepentingan sendiri, sehingga konflik di Afghanistan bisa dikatakan sebagai proxy wars (perang perpanjangan) dari kekuatan-kekuatan besar tersebut. Terakhir, telah ada banyak upaya-upaya perdamaian dari negara besar seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, negara-negara Arab dan negara-negara Skandinavia, namun semua itu belum mendatangkan perdamaian yang abadi (Khan, 2015). Namun, semua fakta ini tidak mengendorkan niat pemerintahan Jokowi-JK untuk membantu terwujudnya perdamaian di Afghanistan. Melalui teori rational choice, penelitian ini mengungkapkan pertimbangan dan kalkulasi politis dari pemerintahan Jokowi JK dan upaya-upaya yang akan ditempuh dalam memperjuangkan perdamaian di Afghanistan.

Rational choice dipandang sebagai pendekatan yang ingin menjelaskan perilaku individual dan kolektif berdasarkan hasil-hasil dari tujuan yang ingin dicapai dalam batasan kendala yang ada. (Snidal, 2012). Pada level yang paling dasar, teori ini berasumsi bahwa semua orang itu rasional. Namun, rasionalitas di sini terkait dengan tujuan dari pelaku. Rasionalitas tidak mengandung konotasi yang berasal dari perilaku normatif. Artinya, rasionalitas tidak mesti berarti bahwa orang

berperilaku dengan mengindahkan kaidah moral atau etik. Sebagai contoh, Hilter adalah orang rasional bahkan ketika tidakannya tidak terpuji secara moral. Begitu juga dengan tindakan teroris yang merugikan banyak orang (Slantchev, 2018).

Pendekatan aktor rasional memperlakukan kebijakan luar negeri sebagai produk dari konsekuensi-konsekuensi yang diidealisasikan. Seorang pengambil keputusan yang rasional akan mempertimbangkan tujuan kebijakan luar negeri dan menentukan pilihan-pilihan yang tersedia. Dalam analisisnya, aktor akan mempertimbangkan untung dan ruginya (cost and benefit), dengan mengurutkan pilihan-pilihan yang paling disukai, dari yang paling sedikit hingga tertinggi biayanya. Ia juga akan memperhatikan manfaat-manfaat yang bisa diperkirakan, serta keadaan-keadaan yang bisa muncul secara tak terduga dan mengganggu manfaat yang diinginkan, termasuk gangguan dari lawan-lawan politik (ibid).

Data yang akan dianalisis dalam penelitian ini berasal dari dokumen pemerintah, pemberitaan media dan pendapat-pendapat dari para ahli tentang upaya pemerintahan Jokowi-JK dalam perdamaian di Afghanistan. Data-data ditelusuri melalui studi perpustakaan baik online maupun offline. Selanjutnya data yang ditemukan akan direduksi, diverifikasi melalui perbandingan data lain, dan akhirnya disajikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dimensi Historis dan Konstitusional

Dalam UU nomer 37 tahun 1999 disebutkan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia bersifat bebas aktif, yang memiliki arti bahwa Indonesia berkomitmen kuat untuk menciptakan perdamaian dunia, sesuai dengan amanah UUD 1945 “untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Dalam upaya mewujudkan perdamaian tersebut, Indonesia tidak melibatkan diri dalam blok kekuatan tertentu, yang berpotensi menghambat perwujudan perdamaian dunia tersebut.

Doktrin bebas aktif telah dianut sejak awal kemerdekaan ketika Indonesia dihadapkan pada pilihan untuk bergabung pada blok Barat atau blok Timur. Blok Barat dipimpin oleh Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat, yang secara ekonomi bersifat kapitalis dan secara politik menganut sistem demokrasi. Di sisi lain, Blok Timur dipimpin oleh Uni Soviet dan diikuti negara-negara yang beraliran komunis, yang sebagian besar berada di Eropa Timur.

Muhammad Hatta, selaku wakil presiden dan Perdana Menteri saat itu, memaklumkan doktrin bebas aktif dalam pidatonya, “Mendayung di antara Dua Karang.” Politik luar negeri Indonesia ini merupakan sebuah pilihan rasional ketika Indonesia masih berada di awal kemerdekaan, tetapi menghadapi ancaman agresi dari Belanda, yang merupakan sekutu Blok Barat. Di sisi lain, Indonesia tidak ingin tergoda untuk jatuh ke dalam pelukan blok Timur, yang berideologi komunisme.

Politik Luar Negeri Bebas Aktif telah mendorong Indonesia untuk berperan aktif dalam penciptaan perdamaian dunia. Sebagai misal, Indonesia menjadi salah satu pelopor penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955, yang berhasil mengundang para pemimpin dari 29 negara-negara di Asia dan Afrika, yang sebagian besar baru mendapatkan kemerdekaan. Konferensi dilakukan untuk mendorong kerjasama ekonomi dan kebudayaan, melawan kolonialisme dan neokolonialisme dari Negara-negara Blok Barat dan Blok Timur. Selanjutnya, Indonesia juga berperan aktif dalam menjaga perdamaian melalui pengiriman pasukan Garuda ke berbagai wilayah yang dilanda konflik sejak tahun 1957, seperti pengiriman pasukan Garuda di Libanon, Nepal, Kongo, Sudan, Liberia, Bosnia, Somalia, Kamboja, Irak-Kuwait, dan Mesir.

Melalui diplomasi perdamaian, Indonesia juga turut serta dalam penyelesaian dan resolusi konflik di sejumlah wilayah. Pertama, Indonesia pernah diminta oleh

Presiden Filipina, Ferdinand Marcos, untuk membantu menyelesaikan separatisme di kepulauan Mindanao. Presiden Indonesia saat itu, Suharto, merespon permintaan tersebut dengan memberikan dukungan bahwa Mindanao adalah bagian dari Filipina. Keterlibatan Indonesia dalam proses perdamaian di Filipina terus berlanjut, hingga diakuinya sebuah kesepakatan damai pada tahun 1996 di mana pemerintah Filipina di Manila memberikan otonomi khusus kepada bangsa Moro di Mindanao. Kedua, saat terjadi konflik perbatasan yang melibatkan kuil Preah Vehear antara Kamboja dan Thailand, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa melakukan pendekatan pada kedua belah pihak dengan menekankan pentingnya mengisi kevakuman pada kawasan yang menjadi konflik, sebelum dating intervensi oleh Dewan Keamanan PBB. Hasilnya, konflik tidak berlanjut di wilayah tersebut. Ketiga, Indonesia membantu penyelesaian konflik antara Kamboja dan Vietnam melalui penyelenggaraan Jakarta Informal Meeting pada tahun 1988 hingga 1989, yang salah satunya menghasilkan rekomendasi penarikan mundur pasukan Vietnam dari Kamboja. Keempat, konflik etnik di Myanmar telah mengakibatkan pengusiran warga Rohingya ke berbagai negara di sekitar. Menteri Luar Negeri Retno L. Marsudi melakukan diplomasi ke Myanmar dan Bangladesh untuk membicarakan masalah pengungsi ini. Menteri Luar Negeri Indonesia itu mengharuskan pada Myanmar untuk menjaga stabilitas keamanan dengan cara militer Myanmar menahan diri dari melakukan kekerasan serta membuka akses terhadap bantuan kemanusiaan untuk menolong penduduk Rohingya (Liputan6.com, 2018)

Dengan meneruskan tradisi keikutsertaan Indonesia dalam penciptaan perdamaian dunia, maka Presiden Jokowi memiliki komitmen yang kuat untuk membantu mencari solusi perdamaian di Afghanistan. Keterlibatan Indonesia ini sebetulnya sudah di mulai sejak era presiden sebelumnya. Sebagai misal, pada tahun 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima kunjungan Ketua Delegasi Parlemen Afghanistan Fazel Haddi Muslimyar, yang didampingi Hafiz Abdul Qayum, Ehsanullah Bayat, dan Rafeullah Haydari di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (14/12/2011). Dalam pertemuan tersebut, Indonesia

menyetujui permintaan delegasi Afghanistan untuk memberikan pelatihan kepada kepolisian Afghanistan, yang rencananya akan dimulai pada 2012 di Pusat Pelatihan Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation (JCLEC) di Semarang.

Presiden Jokowi, setelah bertemu Presiden Afghanistan pada 5 April 2017 di Jakarta, menyatakan keinginannya agar Indonesia memiliki peran aktif dalam penciptaan perdamaian di Afghanistan. Komitmen Presiden Jokowi tersebut disampaikan lagi dalam kunjungan balasnya pada Presiden Asyraf Ghani di Kabul. Dalam kunjungan kedua seorang presiden Indonesia tersebut, setelah sebelumnya Presiden Sukarno melawat ke Afghanistan pada Mei 1961, Jokowi menyatakan bahwa “Indonesia dan Afghanistan akan meningkatkan berbagai kegiatan yang dapat membantu proses peace building dan rekonsiliasi di Afghanistan (setkab.co.id). Saat membuka membuka Konferensi Ulama Trilateral Afghanistan, Indonesia dan Pakistan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat (11/5/2018), Presiden Joko Widodo juga kembali mengulangi komitmennya untuk mewujudkan stabilitas politik keamanan dan perdamaian di Afghanistan. Ia menyatakan “Saya juga menyambut hangat undangan Presiden Ghani agar Indonesia turut mendorong peace building di Afghanistan, termasuk di bidang kerjasama ekonomi, kepolisian, anti-narkoba dan pendidikan.” Konferensi ini berhasil mempertemukan 19 ulama dari Afghanistan, 17 ulama dari Pakistan dan 17 ulama dari Indonesia (voaindonesia.com)

Bahkan, sebagai komitmen pemerintah Jokowi terhadap perdamaian di Afghanistan, pada 27 Juli 2019 Wakil Presiden Jusuf Kalla, bersama pengurus Majelis Ulama Indonesia dan pengurus besar Nahdlatul Ulama, menerima kunjungan delegasi Taliban yang dipimpin oleh Mullah Abdul Ghani Baradar. Menurut Yon Machmudi, Kedatangan mereka ke Jakarta tentu memiliki beberapa signifikansi. Pertama, hal itu merupakan sebuah prestasi tersendiri, karena menunjukkan keberhasilan Indonesia dalam meyakinkan kelompok Taliban untuk menempuh jalan damai melalui perundingan. Kedua, reputasi wakil presiden Jusuf Kalla sebagai mediator dalam konflik di Aceh dan Poso telah mampu melunakkan hati kelompok Taliban untuk

menempuh jalur damai guna menyelesaikan konflik yang sudah bertahun-tahun (Antaraneews.com).

Selain diplomasi perdamaian, pemerintah Indonesia, dalam rangka menciptakan perdamaian di Afghanistan, juga memberikan bantuan dana hibah untuk membangun masjid, klinik, dan pusat studi Islam yang berfungsi sebagai pusat pengetahuan Islam dan interaksi antar berbagai kelompok (Exkemlu.go.id). Diharapkan, klinik yang bertempat di Ahmad Shah baba mina Kabul tersebut bisa melayani ribu penduduk distrik bagrami dan menjaring 6 distrik lainnya, dengan layanan rawat jalan dan rawat inap, serta menjadi rujukan karena peralatannya yang lengkap (Kemlu.go.id).

Dalam bidang pembangunan sumberdaya manusia, pemerintah Indonesia mengadakan pendidikan dan pelatihan bidang Energi dan Sumber Daya Manusia Batch 3 kepada sebanyak 20 peserta warga Afghanistan yang bertempat di Bandung. Mereka adalah kelompok terakhir yang akan mendapatkan pelatihan mulai tanggal 23 September 2019 hingga 26 November 2019. Kegiatan yang diadakan sejak Agustus 2019 ini diharapkan bisa memberikan pelatihan dan pendidikan pada 100 orang peserta (Kemlu.go.id). Selain itu, terdapat 10 diplomat Afghanistan yang mendapatkan pelatihan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Luar Negeri dalam sebuah kegiatan yang bertepatan "Capacity Building for Afghanistan Diplomats "Indonesia and the Building of Peace Through the Promotion of Tolerance, Pluralism and Democracy: Experiences and Lessons Learned. Para peserta mendapatkan materi pelatihan tentang Ideologi Pancasila, toleransi, masyarakat plural, Islam dan demokrasi di Indonesia, termasuk penjelasan mengenai pengalaman Indonesia dalam diplomasi perdamaian untuk memecahkan konflik di Aceh dan Ambon. Untuk mengenal kehidupan warga Negara Indonesia, para diplomat Afghanistan diajak untuk mengunjungi Masjid Istqlal dan Katedral, dan masyarakat Ambon. Seluruh kegiatan berlangsung antara 16-22 Juli 2019 (Kemlu.go.id).

Bahkan, di bidang kependudukan, pemerintah Indonesia memberikan kesempatan kepada warga Afghanistan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan mengenai keluarga

berencana. Terdapat 5 warga Afghanistan yang mengikuti pendidikan semacam ini, yang diselenggarakan oleh Kerja Sama Teknik Selatan-Selatan dan Triangular (KTSST), Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri (KTLN), Kementerian Sekretariat Negara (Kemensekret) bekerja sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Universitas Gajah Mada Yogyakarta dan United Nation Population Fund (UNFPA) pada tanggal 18 s.d. 29 Maret 2019 di Yogyakarta (ktnl.setneg.go.id). Bidang lain yang juga menjadi perhatian Indonesia adalah pembangunan infrastruktur. Sebagai pelaksanaan dari komitmen Pemerintah Indonesia terkait pemberian bantuan teknik di dalam kerangka Kerja sama Selatan-Selatan (KSS), pemerintah Indonesia memberikan pelatihan dan pengetahuan yang meliputi pengembangan kebijakan infrastruktur, studi kelayakan jalan tol, investasi dan operasi, siklus proyek dan manajemen konstruksi, serta teknologi konstruksi jalan. periode 2006-2017, Indonesia tercatat telah memberikan sebanyak 50 pelatihan yang diikuti oleh 419 peserta dari Afghanistan (www.aa.com.tr/id/headline).

Sedangkan untuk meningkatkan kapasitas pengusaha Afghanistan, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menggelar pelatihan ekspor-impor untuk para pengusaha Afghanistan selama tiga hari di Kabul, Afghanistan. Kegiatan yang bertajuk 'Training on Export-Import Procedure' ini akan berlangsung pada 7-9 Mei 2018. Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia (PPEI), Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag, menggelar pelatihan ini sebagai program pengembangan kapasitas, bersinergi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia Kabul. Diharapkan pelatihan yang diikuti 30 peserta pengusaha Afghanistan tersebut bisa meningkatkan neraca perdagangan kedua Negara, yang pada tahun 2017 Nilai ekspor Indonesia ke Afghanistan tahun 2017 tercatat sebesar USD 20,2 juta, meningkat 24,69% dibandingkan tahun 2016 yang sebesar USD 16,2 juta. Sedangkan, nilai impor Indonesia dari Afghanistan tahun 2017 tercatat sebesar USD 29 ribu, atau turun 6,45% dibandingkan tahun 2016 yang sebesar USD 31 ribu (pressrelease.kontan.co.id).

2. Dimensi Agama

Inisiatif pemerintahan Jokowi-Kalla untuk membantu proses perdamaian di Afghanistan juga memiliki implikasi agamis. Di tengah masih maraknya isu terorisme dan politik identitas yang menyelubungi berbagai peristiwa politik seperti pemilukada dan pemilu presiden di tanah air, pemerintahan Jokowi ingin mempertahankan citra Islam Indonesia sebagai Islam yang moderat dan ramah terhadap perbedaan (Nubowo, Republika, 2018). Promosi Islam moderat ini sebenarnya telah dimulai sejak zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Bali Democracy Forum untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas Muslim moderat sebagai sarana untuk memperkuat demokrasi melalui dialog.

Langkah lebih lanjut dari promosi tersebut adalah sikap Presiden Jokowi untuk terus mendukung perjuangan rakyat Palestina dalam mendapatkan kemerdekaan. Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam berbagai kesempatan. Misalnya, saat terjadi serangan Israel terhadap sebagian bangunan Rumah Sakit Indonesia, di Bayt Lahiya, bagian Utara, Gaza, Sabtu (27/10/2018), Presiden Jokowi mengatakan bahwa Indonesia tetap dan akan selalu di belakang bangsa Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaannya. "Tidak ada kata mundur untuk itu," tegas Presiden Jokowi (setkab.go.id/kecam). Terkait dengan upaya pemindahan kedubes Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Jerusalem, yang dianggap oleh banyak masyarakat internasional sebagai pelanggaran atas wilayah Palestina dan melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB dan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, maka di hadapan para ulama dari Indonesia, Pakistan dan Afghanistan yang sedang berkumpul di Istana Bogor, Presiden Jokowi menyatakan penolakan secara tegas keputusan tersebut lantaran bisa mengganggu proses perdamaian di Palestina dan meminta negara lain tidak melakukan kebijakan yang sama (setkab.go.id/kecam).

3. Politik

Diplomasi perdamaian yang dilakukan Presiden Jokowi merupakan sebuah upaya untuk menjaga citra Negara sebagai Negara muslim moderat di tengah ancaman terorisme dan politik identitas di tanah air. Di sisi lain, jika diperhatikan dari kalkulasi politik, diplomasi itu juga dilakukan di tengah

kebutuhan Presiden Jokowi untuk mendapatkan dukungan politik dari umat Islam, mengingat posisinya yang lemah, setidaknya di tahun-tahun pertama menjabat sebagai presiden. Dalam bidang politik, misalnya, di masa-masa awal pemerintahannya, ia tidak memiliki dukungan politik yang cukup kuat di parlemen. Di internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, salah satu partai yang mendukung pencalonannya sebagai presiden, juga belum secara solid mendukung presiden Jokowi. Para elite partai ini seperti berada pada persimpangan jalan antara mendukung presiden secara penuh dengan resiko Presiden Jokowi, yang bukan kader partai, bisa mengambil kendali atas partai ini, atau menjaga jarak dari presiden dengan resiko tidak bisa ikut menikmati kekuasaan. Fenomena persimpangan itu bisa dilihat dari ucapan salah satu tokoh partai, Puan Maharani, yang memandang Joko Widodo sebagai petugas partai, sehingga harus tunduk pada perintah Ketua Umum Megawati Sukarno Putri. Hal ini tentu saja juga bisa ditafsirkan bahwa hubungan Presiden Jokowi dan Megawati tidak selamanya harmonis (kompas.com) Di sisi lain, Presiden Jokowi juga senantiasa dibayang-bayangi stigma anti Islam, baik karena perilaku keagamaannya yang dianggap kurang islami dan pengetahuan islamnya yang dianggap kurang mendalam, atau karena kebijakan-kebijakannya yang dianggap anti-Islam.

Maka untuk menguatkan posisi politiknya sebagai presiden, Jokowi kemudian berusaha untuk menarik dukungan politik dari partai-partai yang sebelumnya pada pemilu presiden 2014 mendukung pasangan Prabowo-Hatta, dengan memberi mereka jatah menteri di kabinet. Kita dapati di sini, Partai Golongan Karya mendapatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Luhut Binsar Panjaitan), Kementerian Perindustrian (Airlangga Hartarto), Kementerian Sosial (Idrus Marham). Presiden Jokowi juga memberi jabatan Menteri Agama (Lukman Hakim Saefuddin), perwakilan dari Partai Persatuan Pembangunan yang memang sejak awal mendukung pencalonan Jokowi sebagai presiden. Sedangkan Partai Amanat Nasional mendapatkan jatah menteri Pendayagunaan Aparatur Negara/Reformasi Birokrasi (Asman Abnur).

Dengan kehadiran perwakilan dari Partai Persatuan Bangsa dan Partai Amanat Nasional di Kabinet Kerja Jokowi, hal tersebut tentu saja menunjukkan dukungan yang semakin besar dari partai berbasis umat Islam, yang sebelumnya didominasi oleh Partai Kebangkitan Bangsa yang merupakan partai dari kalangan Nahdlatul Ulama, dan salah satu partai politik pendukung pencalonan Jokowi sebagai Presiden RI. Dengan kekuatan sebanyak 47 orang di parlemen, Partai Kebangkitan Bangsa mendapatkan jatah menteri yang cukup banyak, yakni Hanif Dhakiri, (Menteri ketenagakerjaan), Imam Nahrowi (Menteri Pemuda dan Olah Raga), Marwan Ja'far yang kemudian digantikan oleh Eko Putro Sandjojo (Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi), dan Khofifah Indar Parawansa sebagai Menteri Sosial (hingga 17 Januari 2018).

Presiden Jokowi juga berusaha untuk mendapatkan dukungan lebih luas dari kalangan umat Islam. Dalam hal ini, presiden Jokowi dihadapkan pada dua kelompok umat Islam, yakni kelompok garis keras dan kelompok garis moderat. Kelompok garis keras adalah kelompok-kelompok yang menginginkan pelaksanaan Islam secara formal dalam aturan dan struktur negara. Mereka juga sering disebut kelompok radikal. Secara politik, mereka berafiliasi di belakngan pasangan calon presiden Prabowo subianto dan calon wakil presiden Hatta Rajasa. Termasuk dalam kelompok ini adalah mereka yang bergabung ke dalam kelompok 212, sebuah afiliasi yang menentang kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai gubernur DKI. Mereka misalnya Front Pembela Islam (FPI) Sobri Lubis. Ada pula ustaz Abdul Somad, Abdullah Gymnastiar alias Aa Gym, dan Arifin Ilham.

Sedangkan kelompok garis moderat adalah orang-orang muslim atau kelompok muslim yang tidak mendesak formalisasi pelaksanaan syariah Islam di Indonesia. Mereka mendukung keberadaan ideologi Pancasila, menghormati keragaman pemahaman beragama, dan tidak tekstual dalam memahami ajaran agama. Contoh dalam kelompok ini adalah Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, dua organisasi besar di Indonesia yang dikenal sebagai gerakan Islam moderat. Maka, dalam kerangka mendapatkan

dukungan dari kaum Muslimin, Presiden Jokowi lebih mendekati diri pada kelompok garis moderat. Hal tersebut secara politik dikarenakan kelompok moderat lebih mudah untuk diajak kompromi, dan tidak frontal. Maka, kebijakan-kebijakan Jokowi terkait dengan Islam adalah menekankan moderasi keberagamaan.

KESIMPULAN

Dalam hubungan internasional, Presiden Jokowi melanjutkan tradisi politik Indonesia yang bebas dan aktif. Yakni, bebas dalam arti tidak terjebak dalam dukungan terhadap blok kekuatan tertentu, sedangkan di sisi lain Indonesia juga aktif dalam mengupayakan perdamaian dan penyelesaian konflik di berbagai wilayah dunia. Khusus dalam konflik di Afghanistan, Presiden Jokowi memiliki komitmen yang tinggi untuk membantuk proses perdamaian di negeri tersebut, yang diwujudkan dengan mengunjungi Afghanistan dan mengundang para ulama Afghanistan dan Pakistan untuk bertemu dan berdialog di Indonesia. Komitmen juga diwujudkan dalam berbagai bantuan teknik untuk memperkuat sumberdaya manusia yang bekerja sebagai aparatur Negara dan pengusaha. Bantuan lain adalah hibah dana untuk membuat masjid, klinik kesehatan dan pusat Islam di Kabul. Diplomasi Perdamaian Presiden Jokowi juga bisa ditafsirkan sebagai upaya untuk mempertahankan citra Indonesia sebagai Negara muslim yang moderat dan menepis Indonesia dari citra Negara yang diselembungi oleh masalah terorisme dan isu sektarianisme. Namun, di sisi lain, komitmen perdamaian Jokowi di Afghanistan merupakan sebuah upaya dan pilihan rasional Jokowi untuk meyakinkan umat Islam di Indonesia bahwa dirinya tidak anti Islam, dan sebaliknya, memiliki komitmen tinggi untuk membantu saudara-saudara muslim di dunia yang tengah dalam kesulitan

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang telah memberikan dana untuk melakukan penelitian ini. Jika ada, ucapan terimakasih ditujukan kepada institusi resmi atau perorangan sebagai penyandang dana atau

telah memberikan kontribusi lain dalam pengabdian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Anshori, Mohamad Zakaria, 2016. *The role of Islam in Indonesia's Contemporary Foreign Policy*, Disertasi, Victoria University of Wellington.
- Collins, Joseph J., 2011. *Understanding War in Afghanistan*, Washington, D.C.: National Defense University Press,
- Duncan Snidal, "Rational Choice and International Relations," dalam Carlsnaes, Walter, Risse, Thomas, Simmons Beth A, 2012. *Handbook of International*, London: Sage Publications.
- Geertz, Clifford, 1964. *The religion of Java*. Chicago: University of Chicago Press, 1964.
- Madu, Ludiro, 2014. "Reorientasi Politik Luar Negeri Indonesia pada Pemerintahan Joko Widodo, 2014 – 2019," dalam *Transnasional Vol.9 No.2 Desember*.
- Rosyidin, Mohammad, 2014. "Kembali ke Masa Depan? Membaca Arah Politik Luar Negeri Jokowi dan Prospek Indonesia Menjadi Pemain Global," Makalah disampaikan pada Konvensi Nasional V Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII), Universitas Budi Luhur, Jakarta 25-28 November.
- Sukma, Rizal, 2003. *Islam in Indonesian Foreign Policy*. Routledge Courzon: 2003.
- Wicaksana, I Gede Wahyu. 2012. *Islam and Indonesia's Foreign Policy, with Special Focus on Jakarta-Islamabad Relations*. Degree: PhD, University of Western Australia
- Media Online:
- Mangar Situmorang, "Orientasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia 66 di bawah Pemerintahan Jokowi-JK," dalam <https://media.neliti.com/media/publications/98738-ID-orientasi-kebijakan-politik-luar-negeri.pdf>, h. 68-69, diakses 5 Maret 2018.
- Politik Luar Negeri Jokowi di Luar Dugaan, <http://news.metrotvnews.com/politik/ybJMZ04N-politik-luar-negeri-jokowi-di-luar-dugaan>, diakses 5 Maret 2018.
- Presiden Jokowi Terus Dukung Perdamaian di Afghanistan, <https://news.okezone.com/read/2018/01/29/337/1851923/presiden-jokowi-terus-dukung-perdamaian-di-afghanistan>, diakses 5 Maret 2018.
- Wapres JK Bertolak ke Afghanistan untuk Misi Perdamaian, <https://news.detik.com/berita/d-3887454/wapres-jk-bertolak-ke-afghanistan-untuk-misi-perdamaian>, diakses 5 Maret 2018.
- Branislav L. Slantchev, "Introduction to International Relations Lecture 3: The Rational Actor Model", h. 1, dalam <http://slantchev.ucsd.edu/courses/ps12/03-rational-decision-making.pdf>, diakses 6 Maret 2018.
- 4 Negara Berkonflik yang Berhasil Didamaikan Indonesia, <https://www.liputan6.com/news/read/3504929/4-negara-berkonflik-yang-berhasil-didamaikan-indonesia>
- Janji Kuatkan Komitmen Kerja Sama, Presiden Jokowi: Indonesia Dukung Perdamaian Di Afghanistan" <https://setkab.go.id/janji-kuatkan-komitmen-kerja-sama-presiden-jokowi-indonesia-dukung-perdamaian-di-afghanistan/>
- Presiden Jokowi Tegaskan Komitmen Indonesia Wujudkan Perdamaian di Afghanistan <https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-berkomitmen-wujudkan-perdamaian-di-afghanistan/4389399.html>
- Di balik kunjungan delegasi Taliban ke Indonesia, <https://www.antaranews.com/berita/986232/di-balik-kunjungan-delegasi-taliban-ke-indonesia>
- Penandatanganan Hibah Republik Indonesia untuk Pemerintah Afghanistan, <https://ex.kemlu.go.id/kabul/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/Penandatanganan->

- Hibah-Republik-Indonesia-untuk-Pemerintah-Afghanistan.aspx
- Penyerahan Indonesia - Afghanistan Friendship Clinic
<https://kemlu.go.id/kabul/id/news/2104/penyerahan-indonesia-afghanistan-friendship-clinic>
- Pengiriman 20 peserta diklat bidang energi dan sumber daya mineral.
<https://kemlu.go.id/kabul/id/news/2105/pengiriman-20-peserta-diklat-bidang-energi-dan-sumber-daya-mineral>
- Dukung Proses Perdamaian di Afghanistan, Program Pelatihan Bina Damai Menjadi Salah Satu Kontribusi Indonesia.
<https://kemlu.go.id/portal/id/read/461/berita/dukung-proses-perdamaian-di-afghanistan-program-pelatihan-bina-damai-menjadi-salah-satu-kontribusi-indonesia>
- Bersama Mencapai Akses Pelayanan Keluarga Berencana Lebih Baik: Pemerintah Indonesia dan UNFPA Menyelenggarakan Pelatihan Keluarga Berencana untuk Afghanistan.
https://ktn.setneg.go.id/berita_ktss_01.html
- Indonesia berbagi pengalaman infrastruktur dengan Afghanistan,
<https://www.aa.com.tr/id/headline-hari/indonesia-berbagi-pengalaman-infrastruktur-dengan-afghanistan/1239942>
- Kirim Tim Pelatihan Ekspor-Import ke Afghanistan, Kemendag Dorong Peningkatan Hubungan Dagang.
<https://pressrelease.kontan.co.id/release/kirim-tim-pelatihan-ekspor-import-ke-afghanistankemendag-dorong-peningkatan-hubungan-dagang>
- Andar Nubowo “Diplomasi Islam Moderat,” dalam REPUBLIKA – 13 Februari 2018
- Kecam serangan Israel Presiden Jokowi: Indonesia selalu di belakang bangsa Palestina,
<https://setkab.go.id/kecam-serangan-israel-presiden-jokowi-indonesia-selalu-di-belakang-bangsa-palestina/>
- Di Depan Ulama, Jokowi Kembali Bela Palestina Soal Yerusalem,
<https://setkab.go.id/kecam-serangan-israel-presiden-jokowi-indonesia-selalu-di-belakang-bangsa-palestina/>
- Jokowi: Saya Memang Petugas Partai...
<https://nasional.kompas.com/read/2014/05/25/1342220/Jokowi.Saya.Memang.Petugas.Partai>. Diakses 21 September 2019
- Mega Tegaskan Status Presiden Jokowi Tetap Petugas Partai..
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150721180244-32-67479/mega-tegaskan-status-presiden-jokowi-tetap-petugas-partai>. Diakses 21 September 2019.